

**EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG JEPANG DALAM
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BARU**

(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

OLEH:

Nur Laily Azizah

NIM : G71216075



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Laily Azizah

NIM : G71216075

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya vane menyatakan,



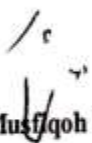
G71216075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Azizah NIM. G71216075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk skripsi.

Surabaya, 25 Februari 2019

Pembimbing,


Siti Musfah M.EI

NIP.197608132006042002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Laily Azizah NIM. G71216075 ini telah dipertahankan di depan majelis Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 16 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,

Siti Musfiqoh, M.El
NIP.197608132006042002

Penguji II

Lilik Rahmawati, M.El
NIP. 198106062009012008

Penguji III.

Andhy Permadi, M.Kom
NIP. 198110142014031002

Penguji IV.

Abdullah Kafabih, M.SE
NIP. 199108072019031006

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Laily Azizah
NIM : G71216075
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : nurlailyzazah07.nls@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2020.

Penulis

(Nur Laily Azizah)
nama terang dan tanda tangan



mensosialisasikan program pemagangan Jepang ke setiap kabupaten/ kota di Jawa Timur.

Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 peserta yang lulus pemagangan Jepang sangat sedikit akibat tidak adanya pembekalan yang diadakan pemerintah, sehingga peserta pemagangan yang dikirim ke Jepang cenderung tidak signifikan. Pada tahun 2016 pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi di setiap kabupaten atau kota untuk menciptakan lembaga pelatihan kerja (LPK) supaya peserta pemagangan mampu mengikuti proses perekrutan dan lolos seleksi pemagangan ke Jepang. Pada tahun 2017 peserta pemagangan di provinsi Jawa Timur dikirim sebanyak 434 orang, tahun 2018 sebanyak 296 orang, tahun 2019 sebanyak 151 orang.

Program pemagangan dibentuk untuk mencapai kualitas ketrampilan sumber daya manusia serta cara efektif dan efisien pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk dapat berdaya saing dalam dunia usaha, ada 62 bidang yang disediakan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang dengan masa kontrak pemagangan kerja 3 tahun namun pada tahun 2017 perjanjian magang kerja berubah, apabila peserta memiliki soft skill yang sangat bagus dapat memperpanjang masa kontrak pemagangan kerja menjadi 5 tahun. Terdapat fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan selama berada di Jepang antara lain gaji 12 juta/bulan (belum termasuk lembur), tempat tinggal/apartemen, tiket pulang-pergi Indonesia ke Jepang, Transportasi. Sedangkan fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan ketika mereka pulang

Harapan pemerintah kepada peserta pemagangan ke Jepang fokus ketika mereka kembali ke Indonesia, ketika mereka mendapatkan pengetahuan, modal, relasi hubungan yang luas, dan keahlian soft skill yang terus meningkat saat pemagangan di Jepang harapannya mampu mengaplikasikannya di Indonesia. Ketika peserta purna magang jepang mendapatkan modal kontrak pemagangan kerja 3 tahun memperoleh tunjangan 76 juta dan visa magang kerja sedangkan kontrak pemagangan kerja 5 tahun atau *Tokutoiginoi* memperoleh tunjangan 130 juta, mampu memanfaatkan modal secara tepat guna dengan cara membuka lapangan kerja baru baik bidang jasa maupun produksi dengan berwirausaha mandiri.

Ketika peserta purna magang mampu mengaplikasikan dengan membuka suatu lapangan kerja baru dengan melalui wirausaha mandiri, harapan pemerintah dari wirausaha mandiri mereka mampu menjadi pelaku produksi dalam pembangunan usaha kecil mikro dan bidang jasa seperti pelatihan kerja supaya tetap tumbuh dan berkembang di wilayahnya. Dengan hal ini otomatis mereka juga membuka lapangan kerja untuk orang lain, ketika mereka berwirausaha mandiri dan memiliki karyawan dapat membantu mengurangi pengangguran, serta menambah pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Setyasih Harini, Damayanti Cristy dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam Meningkatkan Ketrampilan TKI (Studi Kasus: Pelatihan Bahasa dalam Program Magang di Technopark Ganesha Sukowati Sragen)”.⁹ Dengan memakai penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Technopark Ganesha Sukowati Sragen. Technopark ganesha sukowati merupakan lembaga pelatihan bahasa asing yang dibentuk sejak tahun 2013, tujuan lembaga ini dibentuk untuk memudahkan mereka yang ingin mengikuti program pemagangan dengan cara terlebih dahulu mengikuti pelatihan serta menambah soft skill para pemangag. Harapan peserta purna pemangag setelah kembali ke Indonesia dapat memperoleh hasil yang maksimal seperti dalam hal finansial dan kesejahteraan hidup. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti pelatihan bahasa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan diri mengikuti program magang jepang dikabupaten sragen sangat diminati msyarakat, hal ini dikarenakan peserta purna magang ketika mereka kembali ke Indonesia mereka mempunyai modal untuk membuat usaha dan memiliki kesejahteraan hidup tinggi yang berasal dari upah pemagangan Jepang.

Solechan dalam penelitian yang berjudul “Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjaun Program Pemerintah Daerah”.¹⁰

⁹ Setyasih Harini et.al, “Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Meningkatkan Ketrampilan TKI(Studi Kasus: Pelatihan Bahasa dalam Program Magang di Technopark Ganesha Sukowati Sragen)”, Universitas Dian Nuwanto.

¹⁰ Solechan, “Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintah*, 2018, Vol.1.

penelitian ini diharapkan membantu peneliti dalam menjabarkan analisis mengenai gambaran objek dengan jelas dan detail.

Peneliti menggunakan metode analisis pendekatan studi, dengan metode ini untuk mengetahui pemahaman peneliti dalam menyampaikan dan menjabarkan suatu gambaran objek dengan jelas dan memahami konsep-konsep serta mampu menganalisa kejadian dalam efektivitas program magang Jepang dalam penciptaan lapangan kerja baru melalui wirausaha mandiri.

4. Informan Penelitian

Dalam melengkapi sebuah penelitian, peneliti menetapkan narasumber penelitian sesuai dengan tema pembahasan yang akan diteliti. Dalam menentukan informan penelitian yakni dengan cara memilih partisipan yang terlibat langsung dengan studi kasus, memilih sesuai perannya serta mampu memberikan informasi serta membantu mengarahkan sesuai dengan topik permasalahan peneliti.

Dalam menentukan informan penelitian, dengan purposive sampling yakni dengan cara subyektif. Dalam memilih seorang informan, peneliti mempunyai keyakinan bahwa informan yang dipilih memiliki informasi sehingga membantu peneliti dalam menuntaskan penelitiannya.

Berdasarkan penjabaran mengenai informan penelitian, maka peneliti memilih beberapa orang yang layak dijadikan informan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Bidang Pelatihan dan Produktivitas Seksi pembinaan penyelenggaraan pelatihan

Instansi Kedinasan pemerintahan yang memberikan dan melakukan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat tujuannya untuk mencapai kegiatan magang berjalan sesuai rencana dengan cara mensosialisaikan program magang Jepang di setiap kota/kabupaten serta mengadakan pelatihan ketrampilan dalam memenuhi kompetensi kerja. Dalam hal ini Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Bidang Pelatihan dan Produktivitas Seksi pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan sebagai pelaksana dan merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, pengawasan serta pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

- b. Panitia seleksi program magang Jepang

Panitia seleksi program magang jepang mempunyai tugas menyeleksi para peserta program magang Jepang di suatu daerah dari berbagai kota atau kabupaten. Panitia seleksi magang jepang mempunyai dua cara dalam proses pendaftaran yakni dengan cara beregu dan mandiri, pendaftaran beregu yakni peserta yang terdapat beberapa orang sebelumnya peserta telah bergabung dalam lembaga pelatihan kerja (LPK) di kota atau kabupaten masing-masing. Tujuan peserta mengikuti lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan runtutan seleksi program pemagangan ke Jepang untuk mendapatkan bimbingan pelatihan agar

lolos seleksi, sedangkan untuk pendaftaran mandiri yakni murni dari seseorang individu tanpa mengikuti bimbingan pelatihan yang diadakan oleh LPK. Panitia memiliki beberapa persyaratan untuk lolos mengikuti program pemagangan ke Jepang antara lain :

- 1) Persyaratan Administrasi yakni persyaratan yang wajib dipenuhi berupa berkas-berkas pribadi seperti :
 - a) Minimal lulusan SMK/D3/S1
 - b) Usia minimal 18 tahun
 - c) Fotocopy ijazah
 - d) Fotocopy kartu keluarga
 - e) Fotocopy kartu tanda penduduk
 - f) Pas foto 3x4 dua kali, pas foto 4x6 dua kali
- 2) Persyaratan Teknis yakni persyaratan yang harus dipenuhi ketika lolos seleksi administrasi seperti :
 - a) Lolos tes matematika yakni peserta mampu menyelesaikan soal berhitung matematika (20 soal dalam kurun waktu 15 menit, minimal 14 soal benar)
 - b) Lolos kesemaptaan tubuh yakni panitia melakukan pengecekan seluruh tubuh terhadap peserta untuk memastikan tidak ada anggota tubuh yang rusak sedikitpun.
 - c) Lolos tes ketahanan fisik yakni peserta seleksi mampu menyelesaikan lari 3 KM dalam batasan waktu (laki-laki 7,5 kali

Data yang hendak dicari atau diperoleh yaitu data dari hasil wawancara yang berasal dari informan penelitian yakni pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, panitia seleksi program magang Jepang, peserta purna program magang Jepang.

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk memperoleh data :

- Mencari data dari setiap variabel yang bersangkutan dengan penelitian secara online dengan mengunjungi website pemerintah yang bersangkutan.
- Apabila data di website pemerintah tidak ada, maka mencari data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan menemui narasumber yang berkaitan tentang penelitian
- Data yang dibutuhkan adalah data peserta yang mendaftar dan lolos seleksi magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya serta data purna magang Jepang yang berupa wawancara teknik sampling snowballing 10 orang.
- Data yang diambil dari instansi pemerintah harus melalui beberapa prosedur yang harus dijalani, yakni mengurus surat izin penelitian ke fakultas pada tanggal 28 November 2019 melalui *One Day Service* (ODS) untuk diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur.
- Membawa surat dari fakultas yang diajukan ke Bakesbangpol pada tanggal 29 November 2019 dengan menyertakan beberapa berkas yang

- Pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, dalam hal ini melakukan pengamatan yang terjadi di lingkungan mengenai kebutuhan pasar sehingga dapat dijadikan sebagai peluang usaha.
- Seseorang yang berencana membuka usaha juga membutuhkan kompetensi antara lain :
- Kemampuan teknik merupakan kemampuan mengenai bagaimana menyajikan serta memproduksi barang dan jasa.
 - Kemampuan pemasaran merupakan kemampuan mengenai bagaimana menemukan pelanggan, pasar, dan harga yang tepat untuk suatu produk.
 - Kemampuan finansial merupakan kemampuan mengenai cara mendapatkan sumber-sumber dana dan cara menggunakan dananya.
 - Kemampuan hubungan merupakan kemampuan mengenai cara mencari relasi, memelihara dan mengembangkan relasi, negosiasi, serta kemampuan dalam berkomunikasi.
- Ada beberapa hal diperhatikan dalam merintis usaha :
- Jenis dan bidang usaha yang akan dimulai.
 - Bentuk usaha apa yang akan digunakan.
 - Tempat usaha, lokasi yang akan digunakan.
 - Organisasi usaha apa yang akan digunakan.
 - Jaminan usaha yang diperoleh ketika memilih usaha tersebut.
 - Lingkungan usaha disekitar yang akan berpengaruh dengan usahanya.

Organisasi kementerian perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial pada saat pemerintahan republic Indonesia serikat dan struktur organisasinya berdasarkan pada peraturan menteri perburuhan dalam Nomor 1 tahun 1950 dan Setelah itu republik Indonesia serikat resmi membubarkan diri, dengan adanya hal tersebut struktur organisasi kementerian perburuhan disempurnakan dan dibenahi lagi dikeluarkan peraturan mengenai kementerian perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Melalui penggabungan kedua peraturan tersebut mulai muncul adanya pemenuhan struktur organisasi kementerian perburuhan yang menyeluruh dalam struktur organisasi hingga tiap daerah dan melakukan uraian perincian tugas secara jelas. Berdasarkan peraturan menteri perburuhan yang terdapat dalam nomor 70, hal ini mengalami perubahan sehingga untuk dapat mencapai lebih baik lagi melakukan penyempurnaan yang dikeluarkan dalam peraturan menteri perburuhan terdapat pada nomor 77 dirubah menjadi nomor : 79 Tahun 1954. Dengan adanya peraturan tersebut kementerian perburuhan sampai dengan tahun 1964 tidak mengalami perubahan hanya tingkat daerah yang mengalami perubahan.

Mulai pada awal saat terjadi demokrasi terpimpin pertentangan muncul diberbagai tempat sehingga adanya penyelesaian perselisihan suatu usaha kementerian, akan tetapi masalah lainnya seperti pengangguran terabaikan, ketika terdapat kejadian seperti ini melalui PMP nomor 12 tahun 1959 melakukan pembentukan panitia dalam mengatasi perselesihan perburuan kantor tersebut berada pada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pada saat kabinet kerja satu sampai dengan empat struktur organisasi kementerian perburuhan tidak mengalami perubahan sama sekali, namun perlahan pada saat peraturan menteri perburuhan dalam nomor : 8 tahun 1964 mengalami perubahan mengenai jabatan.

Organisasi kementerian perburuhan mengalami perkembangan dibenahi pada 27 November 1964 peraturan yang sudah ada disempurnakan dengan menambah satu jabatan pembantu hal ini terdapat pada peraturan nomor 13 tahun 1964.

Kementerian perburuhan pada masa orde baru mengalami perubahan nama yakni Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan adanya keputusan tersebut masa transisi mengalami keberakhiran saat tahun 1969, dengan hal ini mulai adanya pembangunan dalam tahap 1. Pada waktu pembangunan II Depnaker mengalami perluasan dengan adanya penambahan berupa koperasi, sehingga mempunyai penambahan mengenai fungsi serta tugas yang tidak hanya menagani permasalahan mengenai ketenagakerjaan melainkan permasalahan mengenai transmigrasi dan koperasi yang terdapat pada kepmen nakertranstop nomor kep 1000/Men/1975 serta mengacu pada KEPPRES no 44 tahun 1974.

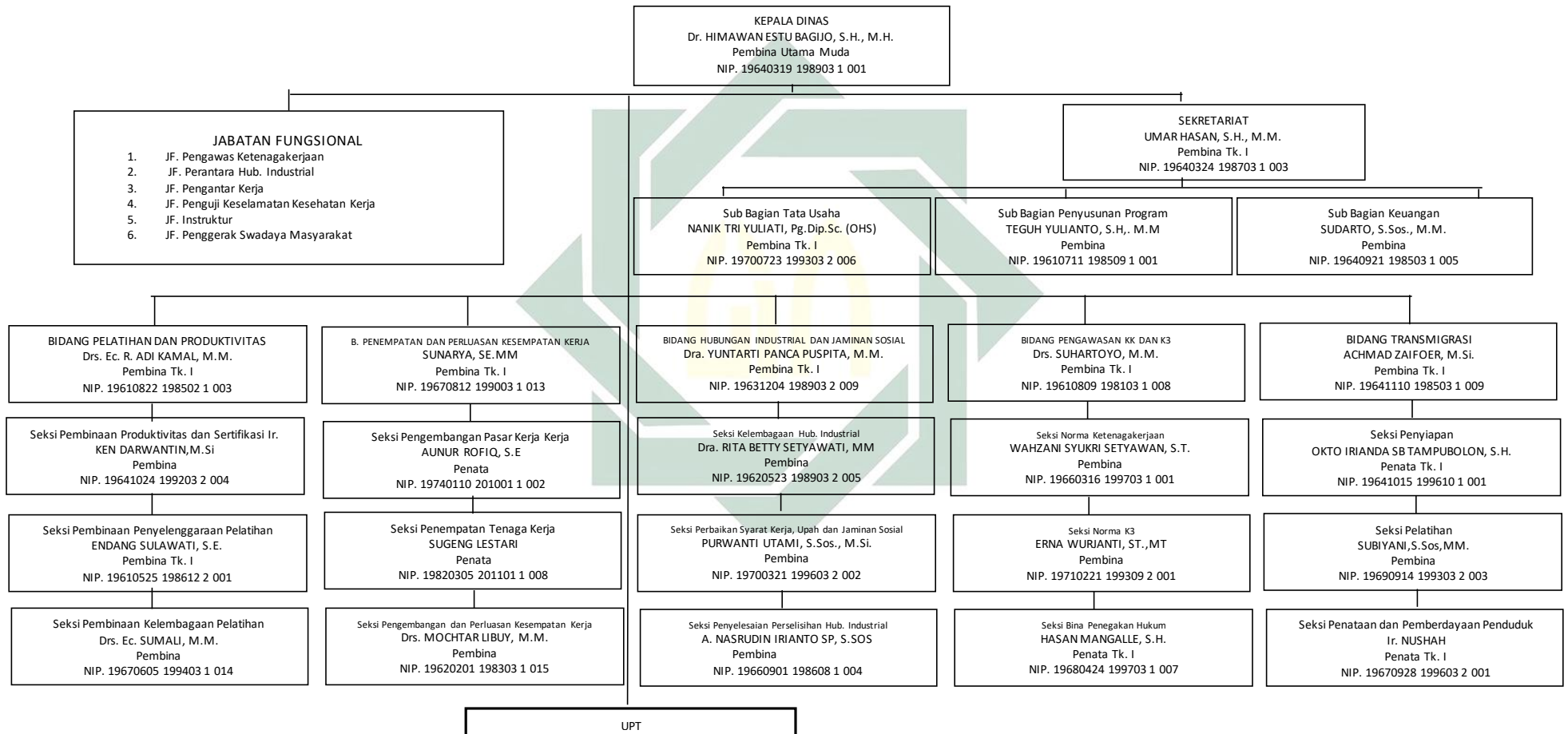
Setelah itu muncul pembangunan III dimana koperasi sudah tidak dipergunakan lagi sehingga menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Selanjutnya terdapat pembangunan dimana transmigrasi mengalami pemisahan dan bergabung kembali pada saat

reformasi, dalam hal ini penataan mengenai tenaga kerja dan transmigrasi terus menerus mengalami perbaikan yang terdapat pada keputusan Presiden RI Nomor 47 tahun 2002 mengenai tentang tugas, fungsi kewenangan, kedudukan, serta susunan organisasi dan tata kerja. Dengan adanya otonomi daerah yang semula bernama kantor wilayah Jawa Timur diubah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan peraturan yang dibuat Gubernur Jawa Timur pada Nomor 84 Tahun 2008 mengenai tentang penguraian dalam tugas sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan sasarannya adalah dalam tahap melakukan perumusan mengenai sasaran strategis yang memberitahukan tingkat suatu prioritas tertinggi dalam suatu perencanaan pembangunan dalam jangka menengah suatu daerah yang setelah itu akan menjadi dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama lima tahun. Tujuan lain dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua bidang. Pertama, tujuan dalam bidang ketenagakerjaan (1) Untuk mewujudkan tenaga kerja yang mampu terampil dan produktif guna untuk mengisi peluang kesempatan kerja yang ada pada dalam dan luar negeri, (2) Untuk mewujudkan dalam penempatan tenaga kerja baik yang ada pada dalam dan luar negeri dan pengembangan terhadap kesempatan peluang kerja melalui

Gambar 3.1

Struktur Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur



Minahasa, Sulawesi Utara menjadi pekerja tidak tetap, mereka tinggal dan bekerja di perusahaan pengelola makanan laut lokak di kota pelabuhan Jepang dan pada tahun 1990 beberapa pelaut Indonesia disewa sebagai Trainee atau pemegang di beberapa vasal laut dalam Jepang.

Pada pertengahan tahun 1990-an kemajuan ekonomi Jepang banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bekerja ke Jepang, pada tanggal 16 september 1993 Indonesia mulai menjalin kerjasama pemagangan ke Jepang dan melakukan penandatanganan perjanjian antara Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (saat ini berubah menjadi Kemnaker) dengan pemerintah Jepang.

Berdasarkan Undang-undang yang terdapat dalam No. 37 Tahun 1999 dijelaskan bahwasanya mengenai hubungan luar negeri dan seperti yang dijelaskan pada Undang-undang yang terdapat dalam No 24 Tahun 2000 dijelaskan bahwasanya mengenai perjanjian internasional, provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia melaksanakan kerjasama luar negeri dengan Jepang melalui Kementrian Ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di setiap daerah dan membuka lapangan pekerjaan di setiap daerah.

Sehingga pada tahun 2002 kementrian ketenagakerjaan melakukan penunjukkan di setiap provinsi dengan cara penunjukkan ke kantor wilayah Jatim untuk menyelenggarakan seleksi pemagangan ke Jepang namun belum terealisasikan, semenjak adanya Otonomi Daerah tahun 2004 hingga sekarang

kantor itu berganti nama menjadi Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur program magang Jepang baru terealisasikan.

Pemagangan di luar negeri, seperti yang dijelaskan pada Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 dijelaskan bahwasanya mengenai prosedur perizinan dan penyelenggaraan magang di Luar Negeri, merupakan suatu system pelatihan kerja yang dilaksanakan secara teratur di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat mendominasi ketrampilan atau keahlian tertentu.

Dalam mengikuti program magang Jepang terdapat proses tahapan seleksi pemerintah melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pada triwulan ke III, rekrutmen dilakukan satu sampai dua kali setiap tahunnya. Dalam proses pendaftaran mempunyai dua cara yakni dengan cara beregu dan mandiri, pendaftaran beregu yakni peserta yang terdapat beberapa orang sebelumnya peserta telah bergabung dalam lembaga pelatihan kerja (LPK) di kota atau kabupaten masing-masing. Tujuan peserta mengikuti lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan runtutan seleksi program pemagangan ke Jepang untuk mendapatkan bimbingan pelatihan agar lolos seleksi, sedangkan untuk pendaftaran mandiri yakni murni dari seseorang individu tanpa mengikuti bimbingan pelatihan yang diadakan oleh LPK. Panitia memiliki beberapa persyaratan untuk lolos mengikuti program pemagangan ke jepang antara lain :

1. Persyaratan Administrasi yakni persyaratan yang wajib dipenuhi berupa berkas-berkas pribadi seperti :
 - a) Minimal lulusan SMK/D3/S1
 - b) Usia minimal 18 tahun
 - c) Fotocopy ijazah
 - d) Fotocopy kartu keluarga
 - e) Fotocopy kartu tanda penduduk
 - f) Pas foto 3x4 dua kali, pas foto 4x6 dua kali
2. Persyaratan Teknis yakni persyaratan yang harus dipenuhi ketika lolos seleksi administrasi seperti :
 - a) Lolos tes matematika yakni peserta mampu menyelesaikan soal matematika (20 soal dalam waktu 15 menit, minimal 14 soal dikerjakan secara benar)
 - b) Lolos kesempataan tubuh yakni panitia melakukan pengecekan seluruh tubuh terhadap peserta untuk memastikan tidak ada anggota tubuh yang rusak sedikitpun.
 - c) Lolos tes ketahanan fisik yakni peserta seleksi mampu menyelesaikan lari 3 KM dalam batasan waktu (laki-laki 7,5 kali putaran, cardivier 3 kali putaran), push up sebanyak 35 kali, sit up sebanyak 25 kali
 - d) Lolos wawancara
 - e) Lolos psikotes
 - f) Lolos medical check-up
 - g) Lolos tes bahasa Jepang

Terdapat 62 bidang yang disediakan pemerintah dalam program pemagangan ke Jepang dengan masa kontrak pemagangan kerja 3 tahun namun pada tahun 2017 perjanjian magang kerja berubah, apabila peserta memiliki soft skill yang sangat bagus dapat memperpanjang masa kontrak pemagangan kerja menjadi 5 tahun. Terdapat fasilitas yang diperoleh peserta pemagangan selama berada di Jepang antara lain gaji pemagangan selama 3 tahun ataupun 5 tahun di Jepang, para peserta pemagangan memperoleh 3 sumber pendapatan utama yakni

1. Gaji yang diperoleh setiap bulan berkisar antara 80.000 yen sampai dengan 120.000 yen perbulan tergantung masa kerja peserta pemagangan dan tempat bekerja pemagangan.
2. Uang lembur biasanya diberlakukan di Jepang pada tahun kedua, upah lembur diberlakukan setiap jam dengan upah 1000 yen. Biasanya waktu lembur 40 jam sampai dengan 60 jam perbulan.
3. Uang modal usaha yang diberikan kepada para peserta magang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak sebesar 600.000 Yen (kurang lebih 76 Juta) dan visa magang kerja sedangkan masa pemagangan kerja 5 tahun memperoleh 1.030.000 yen (kurang lebih 130 Juta).

Selain mendapatkan gaji peserta pemagangan juga memperoleh tempat tinggal/apartemen, tiket pulang-pergi Indonesia ke Jepang, Transportasi, sertifikat kompetensi kerja (JITCO) memudahkan para pemagang ketika mereka kembali ke Indonesia untuk bekerja dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

di setiap daerah. Dengan hal ini program magang Jepang ini bisa dijadikan alternatif pemerintah sebagai usaha dalam mengurangi pengangguran.

Peserta program magang Jepang ketika melakukan pemagangan memperoleh gaji setiap bulannya yang jumlahnya lumayan besar. Hal ini jika peserta program magang Jepang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka akan membawa sejumlah uang tabungan dari hasil gajinya selama magang, selain itu mereka juga mendapatkan uang lembur dan uang modal usaha kepada peserta magang Jepang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak magang.

Jumlah tabungan yang diperoleh peserta magang Jepang cukup potensial ketika mereka kembali ke Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu pengalaman yang diperoleh ketika magang, etos kerja dan budaya yang ada di Jepang diharapkan mampu mendukung mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peluang mereka dalam membuka usaha dapat dikatakan terbuka lebar.

Namun terdapat kendala yang terjadi ketika purna magang Jepang ketika mereka kembali ke Indonesia misalnya mereka merasa mempunyai tabungan banyak atau orang kaya baru sehingga mereka merubah gaya hidup tinggi dan konsumtif berlebihan, rentan penipuan, minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan sehingga menyebabkan menghabiskan seluruh tabungan yang dikumpulkan ketika magang di Negara lain hal ini menyebabkan kehidupan mereka tidak lebih baik dari sebelumnya dan tujuan mengikuti magang diluar negeri untuk merubah hidupnya menjadi sia-sia.

Harapan pemerintah setelah mereka kembali ke Indonesia bukan lagi mencari pekerjaan melainkan mengelola modal yang dimiliki dan bisa membuat lapangan pekerjaan atau lapangan usaha sendiri dengan memanfaatkan keunggulan dan kearifan local di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas yakni harapan pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kepada purna magang Jepang bilamana menciptakan wirausaha mandiri seperti industri rumahan, industri produksi, jasa. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia purna magang Jepang tidak berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, kabupaten atau kota dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak bosan memonitoring dan evaluasi serta pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Dengan adanya data peserta program Jepang pemerintah mengunjungi tetapi terkadang ada yang balik ke Jepang kembali karena adanya visa tokuteiginou (visa yang memberi kesempatan purna magang Jepang kembali lagi ke Negara Jepang) purna magang Jepang beranggapan dunia industri di Indonesia masih dianggap kurang menunjang, harapan mereka masih tetap ke negara Jepang untuk mencari rezeki sebagai modal usaha untuk wirausaha.

D. Upaya pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program magang Jepang

Dalam setiap daerah pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan program magang Jepang dengan cara melakukan sosialisasi di setiap kabupaten/kota mengenai program magang Jepang dan menyelenggarakan seleksi program magang Jepang. Dalam pemagangan ini memilih Negara Jepang dikarenakan sebagai tolak ukur Negara maju yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, teknologi yang canggih, serta memiliki etos kerja sangat baik sehingga pemerintah memilih bekerja sama tujuannya setelah mereka kembali ke Indonesia dapat mengaplikasikannya di Indonesia.

Namun Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ketika melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menganggarkan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah.

Program magang Jepang diikuti dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur secara merata seperti Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Situbondo, Bondowoso, Malang, Kediri, Jombang, Blitar, Madiun, Ponorogo. Hal ini terjadi karena adanya lpk penyangga untuk mendukung program magang, para purna magang Jepang juga mendukung adanya program magang dengan mendirikan lembaga pelatihan kerja (LPK) persiapan magang ke Jepang. Namun program magang Jepang belum diikuti di kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo, pemerintah melakukan upaya agar semua daerah mengikuti program magang Jepang. Respon masyarakat mengenai program magang Jepang sangat bagus, sangat antusias tertarik untuk mendaftar dan memiliki rasa sosial yang tinggi.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan program magang Jepang tidak mengalami kesulitan namun tidak semua pemerintah kabupaten atau kota mendukung adanya program magang Jepang sehingga mengalami kendala dalam koordinasi, menurut pemerintah provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota lebih sulit ketika adanya otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah, jika setiap daerah menyiapkan peserta pemagangan sehingga memungkinkan banyaknya peserta yang mendaftar dan lolos seleksi program magang Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program magang Jepang selain sosialisasi di setiap daerah dan sosialisasi di lembaga pelatihan

kerja, sekolah SMA atau SMK. Pemerintah juga melakukan promosi magang Jepang melalui media cetak seperti pamflet, brosur, membuat spanduk sebagai promosi di setiap kabupaten atau kota disebarluaskan diseluruh Jawa Timur, dan media elektronik seperti melalui web Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Televisi pernah tayang di Jtv mengenai program magang Jepang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam program magang Jepang untuk mengurangi pengangguran di setiap daerah dengan cara melakukan promosi ke setiap daerah kota atau kabupaten, ketika melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menganggarkan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah. Pemerintah juga melakukan promosi magang Jepang melalui media cetak seperti pamflet, brosur, membuat spanduk sebagai promosi di setiap kabupaten atau kota disebarluaskan di

Pemagangan di luar negeri, sebagaimana Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di Jepang, merupakan suatu system pelatihan kerja yang dilaksanakan secara terpadu di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Pada pengimplementasian program magang Jepang diharapkan mampu mengurangi pengangguran di setiap daerah, meningkatkan soft skill tenaga kerja, serta menjadikan Negara Jepang sebagai tolak ukur Negara maju yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi, etos kerja yang baik, komitmen, loyalitas, dan sifat pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga dengan adanya kebiasaan yang baik purna magang Jepang mampu mengaplikasikannya di Indonesia, serta dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

a. Analisis Pelaksanaan Program Magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan program magang Jepang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Permenakertrans No. PER. 08/MEN/V/2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di luar Negeri, merupakan suatu bagian dari system pelatihan

kerja yang diselenggarakan secara teratur di Indonesia dan luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja, instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan dibawah pengawasan dan bimbingan instruktur maupun pekerja yang berpengalaman di bidangnya, dalam proses produksi barang atau jasa untuk dapat menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu. Para peserta untuk dapat lolos seleksi dalam mengikuti program magang Jepang harus memenuhi tahapan seleksi seperti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Implementasi program magang Jepang sudah sesuai dengan yang dijelaskan pada penjabaran tahapan sebelumnya, hal tersebut jika dilihat dari proses tahapan seleksi peserta program magang Jepang. Namun jika dilihat dari segi keberhasilan pemerintah Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jawa Timur dalam melakukan promosi di setiap daerah kabupaten atau kota masih kurang. Karena mengalami kendala dalam koordinasi, menurut pemerintah provinsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota lebih sulit ketika adanya otonomi daerah dibandingkan dengan sebelum era otonomi daerah, jika setiap daerah menyiapkan peserta pemagangan sehingga memungkinkan banyaknya peserta yang mendaftar dan lolos seleksi program magang Jepang.

Selain itu pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih

mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menggandakan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah. Proses pelaksanaan program magang Jepang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan pada Triwulan III.

Berdasarkan hasil perolehan wawancara yang diperoleh peneliti dari bapak samsul selaku panitia seleksi program magang Jepang mempunyai tujuan dari magang Jepang yakni melatih mulai dari etos kerja, teknologi, pemberian modal usaha, serta menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan wirausaha mandiri dan dapat merekrut pekerja di daerah masing-masing. Dalam menjalankan program magang Jepang pemerintah memiliki LPK penyangga yang didirikan oleh purna magang Jepang supaya para peserta program magang Jepang dapat lolos persyaratan seleksi, dengan adanya jumlah pengangguran karena tingginya permintaan kompetensi perusahaan sedangkan pencari kerja tidak memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan sehingga pemerintah memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa implementasi program magang Jepang sudah sesuai dengan seperti yang dijelaskan pada

Minat masyarakat serta respon masyarakat mengenai program magang Jepang sangat bagus, sangat antusias tertarik untuk mendaftar dan memiliki rasa sosial yang tinggi serta banyak yang mendaftar mengikuti seleksi program magang Jepang untuk merubah nasib dan perekonomian hidupnya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa ketepatan sasaran program yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya, hal tersebut jika dilihat dari data minat masyarakat untuk mengikuti seleksi program magang Jepang. Karena minat masyarakat serta respon masyarakat mengenai program magang Jepang sangat bagus, sangat antusias tertarik untuk mendaftar dan memiliki rasa sosial yang tinggi serta mengikuti pelatihan sebelum mendaftar.

c. Analisis peranan pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam program magang Jepang

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki peranan program magang Jepang, jika dilihat dari data peserta lolos seleksi program magang Jepang pemerintah berupaya mengurangi pengangguran di setiap kabupaten atau kota salah satunya melalui program magang Jepang.

Pemerintah memiliki tujuan dari magang Jepang melatih mulai dari etos kerja, teknologi, pemberian modal usaha, serta menciptakan generasi muda yang mampu menciptakan wirausaha mandiri dan dapat merekrut pekerja di daerah masing-masing serta melakukan koordinasi dan sosialisasi program magang Jepang di setiap kabupaten atau kota. Dengan banyaknya jumlah pengangguran karena tingginya permintaan kompetensi perusahaan

sedangkan pencari kerja tidak memenuhi syarat yang diinginkan perusahaan sehingga pemerintah memberikan pelatihan untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur upaya pemerintah dalam program magang Jepang untuk mengurangi pengangguran di setiap daerah dengan cara melakukan promosi ke setiap daerah kota atau kabupaten, ketika melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang ada di Jawa Timur tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah kabupaten atau kota tentang adanya program magang Jepang, hal ini karena adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tetapi ada juga pemerintah kota atau kabupaten yang mendukung program magang Jepang dengan menganggarkan biaya untuk pelatihan sebelum mengikuti seleksi program magang Jepang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di daerahnya dan menambah pendapatan perekonomian daerah. Pemerintah juga melakukan promosi magang Jepang melalui media cetak seperti pamflet, brosur, membuat spanduk sebagai promosi di setiap kabupaten atau kota disebarluaskan diseluruh Jawa Timur, dan media elektronik seperti melalui web Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Televisi pernah tayang di Jtv mengenai program magang Jepang.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penyelenggara program magang Jepang sangat berperan penting dalam melakukan sosialisasi program, tujuan program, ketepatan sasaran program dalam menyampaikan di setiap daerah, namun juga memiliki kendala dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota dikarenakan susah nya koordinasi akibat adanya otonomi daerah sehingga pemerintah kabupaten atau kota lebih memilih mengurus daerahnya dibandingkan ikut campur dengan urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

B. Analisis Efektivitas Program Magang Jepang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru

Dengan adanya program magang Jepang harapan pemerintah mampu mengatasi pengangguran, meningkatkan kompetensi skill para pemegang meningkatkan keahlian kerja serta menumbuhkan produktivitas, meningkatkan etos kerja, meningkatkan ketrampilan, menambah wawasan ilmu pengetahuan, selain itu sebagai langkah awal dalam membuka lapangan kerja baru melalui wirausaha mandiri.

Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berharap ketika para purna magang Jepang kembali ke Indonesia dapat menularkan etos kerja serta berkompetensi tinggi saat berada dalam dunia kerja serta memperbaiki daya saing nasional di dunia internasional. Meski para purna magang Jepang sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri seketika selesai masa kontrak dari magang Jepang namun pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

menyarankan supaya purna magang Jepang mampu membuka wirausaha mandiri sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.

Peserta program magang Jepang ketika melakukan pemagangan memperoleh gaji setiap bulannya yang jumlahnya lumayan besar. Hal ini jika peserta program magang Jepang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka akan membawa sejumlah uang tabungan dari hasil gajinya selama magang, selain itu mereka juga mendapatkan uang lembur dan uang modal usaha kepada peserta magang Jepang sebagai bonus telah menyelesaikan masa kontrak magang.

Jumlah tabungan yang diperoleh peserta magang Jepang cukup potensial ketika mereka kembali ke Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha. Selain itu pengalaman yang diperoleh ketika magang, etos kerja dan budaya yang ada di Jepang diharapkan mampu mendukung mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta peluang mereka dalam membuka usaha dapat dikatakan terbuka lebar.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ec. Sumali, MM. selaku kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan, bidang pelatihan dan produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur harapan pemerintah kepada purna magang Jepang bilamana menciptakan wirausaha mandiri seperti industri rumahan, industri produksi, jasa. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia purna magang Jepang tidak berkomunikasi

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi, kabupaten atau kota dengan adanya hal tersebut pemerintah tidak bosan memonitoring dan evaluasi serta pemerintah mengalami kesulitan karena tidak ada yang melapor. Dengan adanya data peserta program Jepang pemerintah mengunjungi tetapi terkadang ada yang balik ke Jepang kembali karena adanya visa tokutegino (visa yang memberi kesempatan purna magang Jepang kembali lagi ke Negara Jepang) purna magang Jepang beranggapan dunia industri di Indonesia masih dianggap kurang menunjang, harapan mereka masih tetap ke negara Jepang untuk mencari rezeki sebagai modal usaha untuk wirausaha.

Sedangkan berdasarkan perolehan wawancara dari berbagai informan purna magang Jepang antara lain bapak Hadi, bapak Hari Sukardi, bapak Nur Nagata, bapak Januar Pane, bapak Dwi, bapak Cipto, bapak Mbah Jefri, bapak Suyono, bapak Amas, bapak Rudi. Dapat disimpulkan dari 10 informan purna magang Jepang tersebut mengelola upah dari hasil pemagangan ke Jepang dengan membuka usaha mandiri dan memiliki karyawan, baru merintis usaha, membuka jasa lembaga pelatihan kerja, serta memanfaatkan sertifikat kerja dari program magang Jepang dengan dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan di perusahaan Indonesia.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwasanya program magang Jepang snowballing sampling 10 orang dapat dikatakan efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dikarenakan ketepatan sasaran program dan tujuan program, purna magang Jepang dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya modal dari upah yang diperoleh ketika mereka kembali ke

